

# **IMPLEMENTASI GOOD COPORATE GOVERNANCE PADA PDAM TERKAIT DENGAN FUNGSI PELAYANAN PUBLIK (Study PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas)**

**TAMRIN Slp.  
A.21211092**

## **Abstrak**

Tesis ini berjudul : implementasi good coporate covernance pada pdam terkait dengan fungsi pelayanan publik (studi PDAM tirta muare ulakan kabupaten sambas) Meningkatnya aktipitas pembangunan dan pemukiman berimplikasi kepada semakin meningkatnya kebutuhan akan air bersih Dampak negative dari situasi tersebut yaitu berakibat semakin kritisnya kondisi hidrologis dan kelestarian konservasi air, serta semakin tercemarnya sumber air. Kondisi ini akan Nampak dengan sangat besarnya fluktuasi debit air antara musim hujan dan musim kemarau. Artinya adalah semakinjeleknya fungsi tangkapan air sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS), berakibat semakin langkanya air musim kemarau dan menjadi bencana banjir pada musim hujan. Sumber daya air memiliki karakteristik yang amat berbeda dibandingkan dengan sumber daya alam lainnya. Pada suatu saat musim tertentu jumlahnya bisaamat melimpah bahkan menjadi bencana banjir, Akan tetapi pada saat musim yang lain air menjadi barang yang amat langka karena bumi sedang dilanda kekeringan atau musim kemarau yang panjang.

Pada dasarnya , air tanah dan air permukaan jumlahnya paling sedikit bila dibandingkan jenis air yang lain. Dengan keadaan tersebut, dapat menimbulkan situasi langka atas Sumber daya Air (SDA) tersebut. Kelangkaan air inilah yang kemudian menjadi pemicu konflik antar sesama warga, masyarakat, pemerintah. Oleh karena itu untuk mengatasinya dibutuhkan strategi pengaturan yang tepat melalui penciptaan hukum yang didorong oleh politik hukum atas sumber daya alam khususnya air.

Kabupaten Sambas sebagai salah satu Kabupaten yang berkembang saat ini sangat membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana pendukung baik itu berupa sarana dasar maupun sarana penunjang. Air sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Sambas saat ini sangat perlu sekali mendapatkan perhatian. Hal ini dapat dilihat dari kondisi Kabupaten Sambas yang sebagaian penduduknya berada di daerah pesisir, sehingga pada saat musim kemarau sangat membutuhkan sekali layanan air bersih untuk kebutuhan masyarakat.

Fokus penelitian tesis ini terhadap implementasi Pelayanan Penyediaan Air bersih Oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas yang merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Sambas yang berfungsi sebagai penyedia pelayanan, pendistribusian akan kebutuhan air bersih kepada masyarakat. Yang terimplementasi Dalam Pelayanan Publik kepada

masyarakat akan kebutuhan air bersih di kabupaten Sambas, yang smestyinya merupakan Hak masyarakat untuk mempoeroleh ketersediaan air bersih dalam berbagai situsasi namun pada kenyataannya pelayanan air bersih di kabupaten sambas belum maksimal dilakukan, karena bebera factor dan kendala yang dihadapi.

**Kata Kunci : good coporate covernance, pelayanan publik**

### **Abstract**

The thesis is entitled: implementation of good coporate covernance the taps associated with public service functions (PDAM Tirta study muare district Ulakan sambas) aktipitas Increased residential development and implications for the increasing demand for clean water negative impact of the situation which resulted in the critical hydrological conditions and sustainability water conservation, as well as the pollution of water sources. This condition appears to be very wide fluctuations in water level between the rainy season and dry season. The meaning is along the water catchment function semakinjeleknya Watershed (DAS), resulted in the scarcity of water and the dry season to the wet season floods. Water resources have very different characteristics compared to other natural resources. At a certain time of the season bisaamat abundant amount even be disastrous floods, however during another season water becomes scarce goods because the earth was hit by drought or long dry season.

Basically, groundwater and surface water at least in number when compared to other types of water. With these circumstances, it may cause a rare situation on Water Resources (SDA) is. Scarcity of water is then a cause of conflict among fellow citizens, communities, governments. It is therefore necessary to address appropriate management strategy through the creation of political laws are being pushed by law over natural resources especially water.

Sambas district as one of the district is currently developing States desperately needs improved facilities and supporting infrastructure whether it be basic facilities and supporting infrastructure. Water as one of the basic needs of the people in Sambas district today is very essential to get attention. It can be seen from the Sambas district that is populated in part in coastal areas, so that during the dry season in desperate need of clean water for all service needs of the community.

This thesis research focused on the implementation of Clean Water Supply Services By Local Drinking Water Company Tirta Muare Ulakan Sambas district which is the only one owned companies in Sambas district that serves as a service provider, will distribute clean water to the community. Which is implemented in the public service to the community of the need for clean water in Sambas district, which is smestyinya mempoeroleh public's right to clean water availability in various situsasi but in fact water services in the district sambas do not maximized, due to several factors and constraints faced.

**Keyword : good coporate covernance, public service**

## **Latar Belakang**

Air merupakan sumber daya alam yang mutlak diperlukan bagi hidup dan kehidupan, tidak hanya manusia tetapi juga makhluk hidup lain, beserta lingkungannya, Sebagai sumber daya alam ketersediannya, baik jumlah maupun mutunya bervariasi menurut ruang dan waktu. Demikian pula fungsi dan kegunaannya memerlukan berbagai upaya peningkatan dan perlindungan agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna

Dengan pengembangan dan pengelolaan, sumber daya air mempunyai guna yang luas bagi perekonomian, kehidupan dan lingkungan. Karena berbagai peristiwa masih harus dihadapi di bidang penanganan sumber daya air. Dalam upaya memenuhi amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), "Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" Oleh karena beberapa aturan dibuat dalam kaitannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air ini baik yang di atur pada tingkat pemerintah Pusat maupun pengelolaannya yang menggunakan kewenangan pemerintah daerah di daerah yang kesemuanya itu untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Secara umum problematika air terutama air bersih dapat dibagi menjadi tiga masalah utama , yaitu kuantitas, kualitas, Kontinuitas dan distribusinya. Secara kuantitatif air bersih yang dapat dikonsumsi manusia di muka bumi ini jumlahnya sangat sedikit. Oleh karena dari jumlah air yang tersedia di permukaan bumi tersebut, sebanyak 97 % tidak dapat dikonsumsi manusia, dan dari 3 % sisanya, duapertiganya terperangkap di dalam es di Antartika atau jauh tersimpan di dasar bumi, sehingga kondisi seperti ini keberadaan air yang memiliki kualitas yang baik tidak merata di seluruh dunia, dan pada kenyataannya jumlah air tawar tersebut kualitasnya buruk dan sudah tercemar oleh berbagai jenis limbah.<sup>1</sup>

Secara umum, Indonesia memiliki curah hujan yang cukup tinggi yaitu mencapai 2.799 mm/tahun, dengan kondisi seperti itu seharusnya Indonesia memiliki kecukupan untuk air bersih dan bahkan sangat melimpah dibandingkan dengan negara di dunia ini dengan rata-rata sebesar 15.500 m<sup>3</sup> per orang per tahun. Cuman

---

<sup>1</sup> . Prof. Dr. Suteki,SH.,MHum,Hak Atas Air Pro Rakyat, Surya Pena gemilang Publishing.hal 73

yang menjadi kendala besar ketersediaan air bersih di Indonesia yaitu permasalahan dalam pendistribusian, disamping masalah lain yaitu yang sangat bergantung pada musim, terutama pada musim kemarau.

Akibat perubahan iklim global, pola iklim turut berubah secara signifikan. Sejak tahun 1990-an data menunjukkan bahwa kekeringan datang lebih awal sekitar 3 bulan dan mundur sekitar 2-4 bulan. Artinya Durasi kemarau menjadi bertambah lebih dari dua bulan. Inilah yang membuat magnitude, luasan dan intensitas banjir dan kekeringan semakin mengerikan<sup>2</sup>

Meningkatnya aktivitas pembangunan dan pemukiman berimplikasi kepada semakin meningkatnya kebutuhan akan air bersih. Dampak negative dari situasi tersebut yaitu berakibat semakin kritisnya kondisi hidrologis dan kelestarian konservasi air, serta semakin tercemarnya sumber air. Kondisi ini akan berdampak dengan sangat besarnya fluktuasi debit air antara musim hujan dan musim kemarau. Artinya adalah semakin jeleknya fungsi tangkapan air sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS), berakibat semakin langkanya air musim kemarau dan menjadi bencana banjir pada musim hujan.

Kondisi yang demikian apabila tidak dikelola secara antisipatif akan menjadi faktor pendorong munculnya suasana kompetisi dan bahkan mustahil akan memunculkan konflik. Atas dasar tersebut diatas dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2004. Tentang Sumber Daya Air (UUSDA).

Dalam pasal 5, menyebutkan “bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kebutuhan hidupnya yang sehat, bersih, dan produktif. Jaminan ini sekaligus memberikan perintah kepada Negara atau pemerintah untuk wajib menyediakan kebutuhan air minimal tiap orang per hari.

Berdasarkan pada Pasal 4 UUSDA, UU ini mempunyai tiga pilar pengelolaan, yaitu Fungsi Sosial, lingkungan hidup dan ekonomi. SDA mempunyai fungsi sosial yang berarti kepentingan umum lebih diutamakan dari pada kepentingan individu, Pilar Lingkungan Hidup berarti bahwa SDA menjadi bagian dari ekosistem sekaligus sebagai tempat kelangsungan hidup flora dan fauna. Pilar Ekonomi berarti SDA dapat

---

<sup>2</sup> .Irianto, Air dan Permukaan Iklim Global, Kompas, 10 Juni 2003

didayagunakan untuk menunjang kegiatan usaha yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras.

Atas dasar ketiga pilar tersebut, SDA dapat didayagunakan untuk melakukan kegiatan usaha dibidang sumber daya air, maka Dikeluarkanlah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.18 /PRT/M/2007. Tentang Penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Peraturan menteri ini merupakan salah satu Implementasi dari Peraturan pemerintah No. 16 tahun 2005, Tentang Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum.

Adapun maksud dan tujuan dari Penyelenggaraan pengembangan Sistem penyediaan Air Minum (SPAM), ini sesuai apa yang disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara dan para ahli dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan SPAM untuk,

- a. Mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau
- b. Mencapai kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan;
- c. Mencapai peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum ; dan
- d. Mendorong upaya gerakan penghematan pemakaian air.

Kota Sambas selaku Ibukota Kabupaten mempunyai fungsi yang strategis dalam pengembangan Wilayah Kabupaten Sambas. Terletak di pusat wilayah Kabupaten Sambas secara keseluruhan. Luas Kota Sambas sendiri adalah 84,54 KM2 yang meliputi seluruh atau sebagian dari wilayah 18 Desa di Kecamatan Sambas.

Kota Sambas sendiri secara geografis dibelah oleh dua buah sungai besar yaitu Sungai Sambas Kecil dan Sungai Teberau, dimana Sungai Sambas Kecil tersebut mempunyai potensi Sumber Air untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan air bagi masyarakat Sambas.

Kabupaten Sambas sebagai salah satu Kabupaten yang berkembang saat ini sangat membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana pendukung baik itu berupa sarana dasar maupun sarana penunjang. Air sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Sambas saat ini sangat perlu sekali mendapatkan

perhatian. Hal ini dapat dilihat dari kondisi Kabupaten Sambas yang sebagian penduduknya berada di daerah pesisir, sehingga pada saat musim kemarau sangat membutuhkan sekali layanan air bersih untuk kebutuhan masyarakat.

Untuk memperkuat Eksistensi dan kedudukan, PDAM Kabupaten Sambas dalam upaya memberikan pelayanan dan kebutuhan Air bersih dibentuklah Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 4)

Berdasarkan Bab. III Pasal 4. Pasal 5 dan Pasal 6 Perda No. 7 tahun 2010, disebutkan Tujuan, Tugas dan Fungsi PDAM Muare Ulakan Sambas, diantaranya adalah

#### Pasal 4

- (1) Tujuan Usaha PDAM adalah memberikan pelayanan kebutuhan air minum yang berkualitas, dengan kuantitas yang memadai serta berkesinambungan bagi masyarakat.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM dikelola dengan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (good corporate governance), yakni profesional, efisien, transparan, mandiri, akuntabel, patut/wajar, dan tertib administrasi.
- (3) PDAM dalam usaha mencapai tujuannya dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

#### Pasal 5

PDAM Mempunyai Tugas Pokok :

- a. Mengusahakan untuk memenuhi penyediaan air minum yang memenuhi syarat kesehatan untuk keperluan masyarakat.
- b. Menghimpun dana guna pengembangan dan menjaga kelangsungan usaha PDAM dengan berpedoman pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

- c. Sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan Daerah dan salah satu sumber PAD.

#### Pasal 6

PDAM mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan Umum
- b. Penyelenggara Kemanfaatanm Umum
- c. Mendukung pendapatan Asli Daerah

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas yang merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Sambas yang berfungsi sebagai penyedia pelayanan, pendistribusian akan kebutuhan air bersih kepada masyarakat saat ini baru melayani 6 (enam) kecamatan dari 19 (sembilan belas) Kecamatan dengan 34 (tiga puluh empat) Desa dari 184 (seratus delapan puluh empat) Desa di Kabupaten Sambas. Atau baru mencapai 6,38 % cakupan pelayanan wilayah administrasi, 11,61 % cakupan pelayanan wilayah pelayanan existing 6 Kecamatan.

Sehubungan terjadinya pemekaran wilayah Kabupaten Sambas menjadi Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang, pada Tahun 2008, dilakukan pemisahan PDAM Kab. Sambas menjadi PDAM Kab. Sambas, PDAM Kota Singkawang, dan PDAM Kab. Bengkayang. Pemisahan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang dan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang, wilayah Kabupaten Sambas telah dimekarkan menjadi tiga, yaitu Kabupaten Sambas yang berkedudukan di Sambas, Kabupaten Bengkayang yang berkedudukan di Bengkayang, dan Kota Singkawang yang berkedudukan di Singkawang.

Sesuai dengan surat Direktur PDAM Sambas Nomor : 690/531-UM/X/2006 tanggal 2 Oktober 2006 perihal Pemisahan dan Penyerahan Asset PDAM, telah

diambil langkah-langkah persuasif untuk mempercepat proses pemisahan dan penyerahan PDAM.

Dalam rangka pelaksanaan serah terima tersebut disepakati batas pisah (cut off) secara administrasi/pembukuan PDAM Kabupaten Sambas per tanggal 31 Juli 2008 (audited), sehingga segala hak (pendapatan) dan kewajiban (biaya-biaya) yang timbul setelah tanggal cut off tersebut sampai dengan ditandatanganinya berita acara tersebut, dialokasikan sesuai hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan hasil audit oleh auditor independen.

Kesepakatan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyerahan aset melalui Berita Acara Serah Terima Aset dan Kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sambas, antara Pemerintah Kabupaten Sambas dengan Pemerintah Kota Singkawang dan Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada tanggal 17 November 2008.

Dengan ditandatanganinyaberita acara tersebut berpengaruh pada jumlah pendapatan, sambungan rumah, posisi asset tetap, piutang, hutang jangka panjang, dan personil sebagaimana yang disajikan dalam Laporan Keuangan Perusahaan per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007, baik pos-pos neraca maupun pos-pos laba/rugi yang juga merupakan Neraca Awal PDAM Kabupaten Sambas pasca pemisahan.

Berdasarkan pada paparan diatas, sebagai dasar ketertarikanpenulis untuk melakukan sebuah kajian ilmiah dalam penelitian Thesis, dengan Rumusan judul “ Implementasi good corporate governence Pada PDAM Terkait dengan Fungsi Pelayanan Publik .”

### **Permasalahan**

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Good Corporate Governence Pada PDAM Tirta Muare Ulakan dalam memberikan pelayanan belum maksimal
2. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas terhadap PDAM Tirta Muare Ulakan sebagai Good Corporate Governence untuk memberikan layanan kepada konsumen.



## **Pembahasan**

### **Faktor teknis Dan Non tehknis Penyebab belum maksimalnya pelayanan**

Faktor Tehnis dan Non Tehnis yang dimaksud adalah merupakan kendala yang utama dalam pengolahan air bersih Oleh PDAM Tirta Muare Ulakan dalam memberikan pelayanan air bersih di kabupaten Sambas, selain sumber air baku yang sudah dimanfaatkan terdapat juga sumber air baku yang sampai saat ini masih tersebar dan menjadi bahan pertimbangan untuk di kelolan sebagai bahan dasar pengelolaan air di kabupaten sam,bas seperti yang dijelaskan pada tabel berikut :

ASPEK		ISU ATAU MASALAH					
A.	TEKNIS	a. Sampah Domestik ( Organik dan Anorganik ) cukup tinggi pada sumber sungai.					
		b. Kualitas air baku : berbau,berwarna dan keruh akibat Peti dan Pembukaan lahan perkebunan sawit.					
		c. Pada saat kemarau 1 bulan sumber sungai Pedade Payau bahkan asin.					
		d. Terjadi Penurunan Debit Air Baku akibat Illegal Logging /perambahan hutan					
		e. IPA terbuat dari fiber glass unit sekura kondisi rusak berat ( Bocor )					
		f. Kafasitas pompa air baku yang terpasang lebih kecil dari IPA terbangunan .					
	2. UNIT PRODUKSI	a. Tidak tersedianya Alat ukur Debit air baku					
		b. Alat laboratorium tidak lengkap.					
		C. SDM yang terampil cakap belum ada.					
		d. IPA yang dibangun rata-rata Sistem Flat mudah berkarat dan bocor sebaik dari beton bertulang Konfensonal.					
		e. Daerah pelayanan yang menyebar di beberapa Kecamatan / Instalasi Pengolahan Air yang menyebar yang semua dengan Sistim Pengolahan Lengkap					
		e. Back wach pencucian harus sering dilakukan kebocoran rata-rata 10 -15 %.					
	3. UNIT DISTRIBUSI DAN PELAYANAN	a. Kapasitas pipa Distribusi lebih kecil dari kapasitas Pompa terpasang.					
		b. Tidak tersedianya Alat Ukur Debit Air Distribusi					
		c. Pendistribusian semuanya dengan sistim pompanisasi.					
		d. Peta Gambar As Bultit belum ada.					
		e. Umur pipa Galvanis diatas 25 tahun sering terjadi kebocoran pada pipa rata-rata diatas 20 - 30 %.					
		f. Pelanggan banyak meteran air yg rusak bahkan tidak pakai meteran air hal tersebut faktor kondisi water meter dan pelanggan tidak mengalir.					
B.	NON TEKNIS	a. Struktur Organisasi sudah mengacu pada PERDA NOMOR 7 TAHUN 2010 PASAL 10 pelanggan dibawah 30.000 ribu 1 (satu ) Direksi 3 ( tiga ) orang Dewan Pengawas, 2 ( dua ) orang Ka.bag dan 6 ( enam ) Kepala Seksi.					
		b. Dewan pengawas belum melaksanakan pengawasan,pembinaan dan pengendalian terhadap Bsiness plan/coporate plan yg dibuat Direksi.					
	2. SDM	a. SDM masih lemah perlu diadakan diklat/pelatihan secara berkala.					
		b. Perlu peningkatan kemampuan sdm pegawai					
	3. KEUANGAN	a. Dilihat dari Neraca Rugi Laba PDAM Sambas dalam keadaan rugi belum sehat					
		b. Harga Pokok Produksi Air masih diatas Harga Jual					
		c. Pendapatan penjualan yang masih rendah sementara biaya produksi tinggi.					
		d. Masih banyaknya tunggakan pembayaran rekening air oleh pelanggan.					
		e. Tarif Air yang masih rendah					
		f. Jumlah Sambungan Rumah masih sedikit.					

**SUMBER AIR BAKU YANG FOTENSI BELUM DIMANFAATKAN DI KABUPATEN SAMBAS**

NO	NAMA SUMBER AIR BAKU	PROGRAM CAKUPAN PELAYANAN	LOKASI SUMBER AIR BAKU	KAFASITAS SUMBER AIR BAKU ( L/DET )	KAFASITAS YG TERPASANG ( L/DET )	KAFASITAS YG DIPAKAI ( L/DET )	IDLE ( L/DET )
I	AIR PERMUKAAN						
1	SUNGAI SEMELAGI	KEC. SELAKAU KEC. SELAKAU TIMUR KEC. SALATIGA KEC. PEMANGKAT	DESA SEMELAGI HULU KEC. SELAKAU TIMUR	<b>4.051</b>	KWALITAS AIR SEDANG		
2	SUNGAI SAMBAS KECIL TEBERAU	KEC. SEJANGKUNG KEC. SUBAH KEC. SAJAD	JL.SEJANGKUNG BLK POLTEK DESA SEYAWAN ATAU DUSUN SEMBERANG	<b>18.500</b>	KWALITAS AIR SEDANG		
3	SUNGAI SEBANGKAU	KEC. SEMPARUK	DESA SEGULER BT. MAK JAGE ATAU PUTUNG BELIUNG DESA PUSAKA	<b>1.838</b>	KWALITAS AIR SEDANG		
II	MATA AIR						
4	RIAM CAGAT	KEC.SAJINGAN BESAR KEC. GALING KEC. TELUK KERAMAT	DESA SAJINGAN BESAR DUSUN BATANG AIR DESA SAWAH	<b>569</b>	KWALITAS AIR BAIK		
5	RIAM MERASAP	KEC. PALOH KEC. TAGARAN KEC. JAWAI KEC. JAWAI SELATAN	DESA SAJINGAN BESAR DESA SAJINGAN	<b>600</b>	KWALITAS AIR BAIK		
6	RIAM PENCAREK	KEC. PALOH KEC. TAGARAN KEC. JAWAI KEC. JAWAI SELATAN	DESA SAJINGAN BESAR DESA PENATAP	<b>567</b>	KWALITAS AIR BAIK		
7	SUNGAI BENING	KEC.TELUK KERAMAT KEC.JAWAI KEC.TANGARAN KEC.JAWAI SELATAN	DESA SUNGAI BENING KEC.SAJINGAN BESAR	BELUM DI SURVEY			
				<b>26.125</b>			

## **A. Upaya yang Dilakukan dalam peningkatan Pelayanan**

### **c.1.1 Meningkatkan SDM Pegawai PDAM Tirta Muare Ulakan kabupaten Sambas.**

Membuat dan melaksanakan kegiatan PDAM yang **AKUNTABEL** / terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Selalu **INOVATIF** dalam mengembangkan dan mencari ketersediaan air baku, menambah cakupan pelayanan dengan memperbanyak akses masyarakat menikmati air bersih. **RESPONSIF** terhadap segala permasalahan, cepat dan tanggap dalam memberikan pelayanan. Menjaga Kuantitas, Kontinuitas dan Kualitas air bersih bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat agar tercapai **LAYANAN PRIMA**. Selalu **APRESIATIF** dan mendukung tercapainya program visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, Mendorong partisipasi masyarakat, swasta dan stake holders.

Menanamkan keyakinan pada pegawai bahwa melaksanakan tugas dengan **NIAT LUHUR** bahwa tugas yang kita emban adalah tugas mulia dan sbg bentuk sumbangsih dan perjuangan membangun kab. Sambas. Selalu **CERMAT** dalam melakukan tindakan dan membuat keputusan. Mendukung pengembangan, penyediaan sarana dan prasarana air bersih. Meningkatkan kualitas derajat kehidupan dan kesehatan masyarakat dan memberikan penyuluhan akan pentingnya air bersih dan gerakan hemat air.

Meningkatkan kemampuan kuantitas dan cakupan pelayanan. Meningkatkan sumber pendapatan untuk pembiayaan operasional dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai menuju pembangunan manusia seutuhnya yang beriman, **ARIF** dan

**berAKHLAK.**Pemberdayaan dan pembinaan Pegawai / SDM PDAM Kab. Sambas berbasis Kinerja yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.Meningkatkan kinerja dan mengupayakan peyehatan PDAM.Membina moral pegawai dengan **RELIGIUS** dan pendekatan agama.

#### d.1.2 Peran pemerintah kabupaten sambas

Dalamrang kamalakukan pengelolaan, pembinaan dan mengoptimalkan kinerja PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sambas guna mewujudkan sebuah PDAM yang sehat dan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dan mutu pengelolaan air minum yang layak dikonsumsi masyarakat, maka perlu adanya dukungan dana yang memadai.

Kebutuhan air yang semakin meningkat harus mampu disediakan oleh PDAM dengan memanfaatkan berbagai sumber air baku yang ada, baik air permukaan maupun air tanah. Apalagi mengingat pertumbuhan penduduk, pemukiman dan industry besarkan masih signifikan di tahun-tahun ke depan, maka PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas harus memikirkan alternat ef rencana penyediaan air bersih yang meliputi pencarian sumber-sumber air baku alternative. Disamping itu tidak kalah penting adalah penyediaan modal yang cukup untuk pengembangan usaha penyediaan air bersih bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sambas telah berencana memberikan Penyertaan Modal pada PDAM TirtaMuareUlakanKabupaten Sambas yang dilakukan dari

tahun 2004 sampai dengan bulan Januari 2013 adalah sebesar Rp 7.381.364.682,76 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Tujuh Puluh Enam Sen). Dan dana tersebut diatas adalah nilai asset yang telah dibangun pada infrastruktur PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas, yakni telah dibangun jaringan perpipan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum, CiptaKarya, Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Sambas Dengan rincian :

NO	JENIS KEGIATAN	TAHUN	NO KODE	JUMLAH BARANG	HARGA PEROLEHAN (RP)
1	Perbaikan/Rehap IPA PDAM Sambas	2004	1.3.4.03.01	1 Unit	307.790.000,00
2	Penambahan jaringan PDAM Kecamatan Sambas	2007	1.3.4.03.01	1 Unit	1.002.128.824,40
3	Pembangunan/Rehap jaringan pipa PDAM Kecamatan Sambas	2008	1.3.4.03.01	1 Unit	488.331.706,15
4	Pembangunan jaringan perpipaan PDAM Kec.Selakau	2008	1.3.4.03.01	1 Unit	321.624.993,85
5	Sharing PDAM Tebas (Uprating IPA) Kec. Tebas	2009	1.3.4.03.01	1 Unit	308.406.411,36
6	Peningkatan Jaringan Perpipaan Air Bersih IKK Sambas (I)	2010	1.3.4.03.01	1 Unit	640.232.624,76
6	Peningkatan Jaringan Perpipaan Air Bersih IKK Sambas (II)	2010	1.3.4.03.01	1 Unit	675.616.467,24
6	Peningkatan Jaringan Perpipaan Air Bersih IKK Sambas (III)	2010	1.3.4.03.01	1 Unit	640.172.865,38
6	Peningkatan Jaringan Perpipaan Air Bersih IKK Sambas (IV)	2010	1.3.4.03.01	1 Unit	342.725.277,21
6	Peningkatan Jaringan	2010	1.3.4.03.01	1 Unit	640.264.077,06

	Perpipaan Air Bersih IKK Sambas (V)				
6	Peningkatan Jaringan Perpipaan Air Bersih IKK Sebau (I)	2010	1.3.4.03.01	1 Unit	640.190.688,35
6	Pembangunan Jaringan Air Bersih IKK Tebas Paket I	2011	1.3.4.03.01	1 Unit	426.746.943,00
6	Pembangunan Jaringan Air Bersih IKK Tebas Paket II	2011	1.3.4.03.01	1 Unit	400.624.675,00
6	Pembangunan Jaringan Air Bersih IKK Sambas Paket III	2011	1.3.4.03.01	1 Unit	322.124.710,00
6	Pembangunan Jaringan Air Minum di Kab. Sambas.	2011	1.3.4.03.01	1 Unit	185.560.269,00
6	Penambahan Jaringan Perpipaan di Sukaramai Kec. Sambas.	2011	1.3.4.03.01	1 Unit	38.824.150,00
	J U M L A H				7.381.364.682,76

(Sumber: Dinas PUCK, Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Sambas Tahun 2012)

## Kesimpulan

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas yang merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Sambas yang berfungsi sebagai penyedia pelayanan, pendistribusian akan kebutuhan air bersih kepada masyarakat. Untuk memperkuat Eksistensi dan kedudukan, PDAM Kabupaten Sambas dalam upaya memberikan pelayanan dan kebutuhan Air bersih dibentuklah Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas Berdasarkan Perda No. 7 tahun 2010, disebutkan Tujuan Tujuan Usaha PDAM adalah memberikan pelayanan kebutuhan air minum yang berkualitas, dengan kuantitas yang memadai serta berkesinambungan bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, PDAM dikelola dengan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (good corporate governance), yakni profesional, efisien, transparan, mandiri, akuntabel, patut/wajar, dan tertib

administrasi. PDAM dalam usaha mencapai tujuannya dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Salah satunya adalah dengan Pemerintah Daerah, di sisi lain PDAM Tirta Muare Ulakan di berikan Tugas dan Fungsi Mengusahakan untuk memenuhi penyediaan air minum yang memenuhi syarat kesehatan untuk keperluan masyarakat. Menghimpun dana guna pengembangan dan menjaga kelangsungan usaha PDAM dengan berpedoman pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan. Sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan Daerah dan salah satu sumber PAD. Sementara misi yang diberikan kepadanya adalah Pelayanan Umum Penyelenggara Kemanfaatanm Umum Mendukung pendapatan Asli Daerah.

Dengan adanya penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan peraturan daerah tentang penyertaan modal pada PDAM "Tirta Muare Ulakan" Kabupaten Sambas, menunjukkan bahwa setiap kegiatan pemerintah daerah melakukan penyertaan modal daerah pada pihak swasta, BUMD, harus dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai upaya menciptakan payung hukum bagi Perda yang akan dibentuk dalam penyertaan modal daerah. Seiring dengan hal tersebut dan dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah maka peranan Perda Penyertaan Modal Pada PDAM "Tirta Muare Ulakan" Kabupaten Sambas adalah alat otonomi daerah untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan mensejahterakan masyarakat di daerah serta meningkatkan PAD dan pengembangan perekonomian masyarakat di daerah. Kemudian dengan ditetapkannya PERDA Penyertaan Modal pada PDAM "Tirta Muare Ulakan" kepastian hukum tentang asset PDAM tersebut secara legalitas formal telah terjamin.

Faktor Tehnis dan Non Tehnis adalah merupakan kendala yang utama dalam pengolahan air bersih Oleh PDAM Tirta Muare Ulakan dalam memberikan pelayanan air bersih di kabupaten Sambas, selain sumber air baku yang sudah dimanfaatkan terdapat juga sumber air baku yang sampai saat ini masih tersebar dan menjadi bahan pertimbangan untuk di kelola sebagai bahan dasar pengelolaan air di kabupaten sambas.



## Daftar Pustaka

- Aveldoorn, Van., 1984., *Pengantar Ilmu Hukum*.,terjemahan Djambatan, Jakarta,
- Assidiq, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*,
- Budiardjo Miriam.,1988.,*Dasart-dasar Ilmu Politik*, Gramedia., Jakarta
- A.SS Tambunan, *MPR Perkembangan Dan Pertumbuhannya Suatu Analisis pengamatan*, Pustaka Sinar Harapan, Cetakan Pertama, Jakarta, 1991
- Ian Shapiro, *Evolusi hak Dalam teori Liberal*, terjemahan marsi Maris, Yayasan Obor Indonesia, 2006,
- Arfawi Kude, *telaah Kritis teori Negara Hukum* , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005,
- CTS. Cancil,S.H. *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka , 1998.,
- C.F. Strong dalam Sri Sumantri Martosoewignjo, *Pengantar Perbandingan Antar hukum Tata Negara*., Jakarta : Rajawali
- Jimly Assidiq, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia, Sekretaris jendral Dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2006,
- Marbun, *Pokok-Pokok Hukum administrasi Negara*, Liberty Yogyakarta, 1987
- Prof. Dr. Suteki,SH.,MHum,*Hak Atas Air Pro Rakyat*, Surya Pena gemilang Publishing
- Sumantoro, 2001.,*Hukum Ekonomi*, UI Press, Jakarta.
- Marbun,B.N, 2005 *Otonomi Daerah 1945-2005.*, *Proses dan realita Perkembangan Otda Sejak Jaman colonial Sampai Saat Ini.*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- .....,2005, *DPRD dan Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945 dan UU Otonomi Daerah 2004*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Tom Gunadi, *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945*, Angkasa, Bandung, 1990
- Irianto, *Air dan Permukaan Iklim Global*, Kompas, 10 Juni 2003

Peraturan Perundang-Undangan :

- UUD 1945
- UU No. 7 Tahun 2004 , tentang Sumber daya Air
- UUPA. No. 5 Tahun 1960
- UU No. 32 tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2005, Tentang Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2007